

Judul : Pemerintah buka seleksi guru PPPK jadi PNS 2027, sudah tepatkah?
Tanggal : Jumat, 21 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pemerintah Buka Seleksi Guru PPPK Jadi PNS 2027, Sudah Tepatkah?

Pemerintah akan membuka seleksi bagi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apakah langkah itu sudah tepat?

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, pemerintah akan membuka seleksi PNS pada awal 2027. Kebijakan ini pun menjadi perbincangan publik.

"Akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang diperkirakan pendaftarannya akan dibuka pada awal 2027," ujar Nadiem di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Nadiem melanjutkan, Pemerintah juga akan membuka kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026.

"Termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan juga Sekolah Garuda," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Suhmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan tersebut memasuki tahap finalisasi. Dasco menambahkan, pembahasan ini merupakan wujud fungsi pengawasan DPR setelah menerima derasnya aspirasi terkait kejelasan karier para guru.

"DPR sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dikarekakan beberapa masukan yang masuk ke DPR mengenai masalah PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, dan keinginan dari PPPK menjadi PNS," ujar Dasco kepada wartawan usai rapat koordinasi di Gedung Nusantara

III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

Dasco mengatakan, agenda diskusi lintas lembaga ini telah berada di tahap akhir. Cakupannya meliputi mekanisme jalur PNS bagi PPPK penuh waktu, hingga para pengajar di bawah lingkup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Oleh karena itu, pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," katanya.

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih memberikan apresiasi tinggi atas kesepakatan antara Pemerintah dan DPR tersebut. Menurut dia, keputusan strategis ini dinilai sangat

tepat dan luar biasa.

"Pengangkatan PPPK menjadi PNS maupun PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu itu tidak akan jadi beban 30 persen belanja aparatur di Pemda karena semua ditarik menjadi kewenangan pusat," kata Fikri, Kamis (20/8/2026).

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim mengapresiasi dan berterima kasih atas upaya solutif tersebut. Menurut dia, ini merupakan langkah nyata dari Pemerintah bersama DPR.

"Kami melihat ini adalah upaya konkret untuk membenahi kerumitan tata kelola guru selama ini. Persoalan guru di antaranya adalah rekrutmen, distribusi, dan kesejahteraan. Ini kan saling terkait ketiga-tiganya," ungkap Satriawan Salim saat berbincang dengan

Rakyat Merdeka, Kamis (20/8/2026).

Namun, kata dia, Pemerintah harus membuat aturan lebih rinci terkait mekanisme penerimaan PPPK guru ini. Misalnya, Pemerintah, khususnya Panselnas (Panitia Seleksi Nasional), agar 200.000 guru PPPK paruh waktu diangkat secara otomatis menjadi PPPK penuh waktu atau tanpa tes.

"Selanjutnya, guru PPPK penuh waktu menjadi PNS, bisa tanpa tes dan dengan tes. Jika harus tes, harus ada afirmasi bagi guru yang sudah mengajar minimal 10 tahun," lanjut Satriawan.

Untuk mengetahui pandangan Abdul Fikri Faqih dan Satriawan Salim mengenai kebijakan Pemerintah terkait guru PPPK penuh waktu yang bisa menjadi PNS melalui seleksi serta pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, berikut wawancaranya.

ABDUL FIKRI FAQIH, Anggota Komisi X DPR

Ke Depan, Harus Diperluas Sasarannya



“Sentralisasi status guru ini merupakan sebuah terobosan yang patut disambut gembira oleh seluruh kepala daerah di Indonesia.”

SATRIWAN SALIM, Koordinator P2G

Angkat Guru PPPK Paruh Waktu Tanpa Tes



“Semua harus mendapatkan kesempatan menjadi PNS, karena Pemerintah sudah tujuh tahun tidak merekrut guru-guru PNS.”

Apa tanggapan Anda terhadap kebijakan Pemerintah terkait nasib guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)?

Kami memberikan apresiasi tinggi atas kesepakatan antara Pemerintah dan DPR yang mengubah status ratusan ribu guru PPPK menjadi pegawai pusat. Keputusan strategis ini sangat tepat dan luar biasa.

Apa alasannya?

Ya, karena secara langsung menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari beban belanja aparatur. Akan ada pengangkatan 231.240 guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu serta pembukaan peluang seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027 bagi PPPK penuh waktu. Bersamaan dengan itu, status kepegawaian para pahlawan tanpa tanda jasa ini dipindahkan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Apa dampak positif lainnya dari

kebijakan ini?

Sentralisasi status guru ini merupakan sebuah terobosan yang patut disambut gembira oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Poin yang sangat penting adalah kebijakan ini akan sangat membantu Pemda, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

Memang berapa beban belanja pegawai bagi Pemerintah Daerah untuk guru ini?

Pengangkatan PPPK menjadi PNS maupun PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu itu tidak akan menjadi beban 30 persen belanja aparatur di Pemda karena semua ditarik menjadi kewenangan pusat.

Untuk jumlah guru yang dibutuhkan, berapa banyak?

Saat ini, Kementerian PAN-RB memproyeksikan kebutuhan 526.089 formasi guru nasional hingga 2026 guna memenuhi kebutuhan madrasah. Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Garuda. Kuota tersebut akan diperkerjakan

melalui seleksi CPNS pada 2027 dari total 955.245 guru PPPK yang sudah ada. Secara khusus, saya menaruh harapan agar langkah baik Pemerintah ini dapat diperluas sasarannya.

Maksudnya bagaimana?

Pasalnya, kebijakan saat ini baru mengakomodasi penyelesaian status guru di sekolah negeri. Semoga selanjutnya akan secara bertahap ditransfer hingga tenaga kependidikan, khususnya pustakawan dan operator sekolah.

Ada harapan lain kepada Pemerintah terkait sektor pendidikan?

Saya mengimbau Pemerintah untuk segera menyusun simulasi tahapan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03 Tahun 2024. Putusan tersebut mengamanatkan pendidikan SD dan SMP baik negeri maupun swasta, agar digratiskan. Hal ini penting agar 20 persen anggaran pendidikan benar-benar berdampak pada kecerdasan bangsa. ■ **NINA**

Bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan ini?

Indonesia sejak zaman Presiden ke-7 Joko Widodo di periode kedua atau sudah sekitar tujuh tahun, tidak lagi merekrut guru-guru PNS. Ini adalah masalah besar yang kemudian ditumpuk-tumpuk di era pemerintahan selanjutnya. Saya mengagumi ini adalah ide cemerlang dari Pak Dasco sebagai Wakil Ketua DPR bersama Pemerintah untuk mengurai benang kusut tata kelola guru dari segi rekrutmen, distribusi, dan kesejahteraan.

Apa yang terjadi selama ini?

Selama ini, guru-guru honoror diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Persoalannya, lebih dari 200.000 guru PPPK paruh waktu ini digaji sampai tidak manusiawi. Ada yang hanya Rp 300.000, Rp 200.000, Rp 135.000, bahkan ada yang hanya Rp 50.000 per bulan. Adapun guru PPPK penuh waktu, kontribusinya juga berbeda-beda. Ada yang lima tahun, empat tahun, bahkan hanya ada yang satu tahun. Sementara itu,

sekolah-sekolah negeri dan madrasah negeri mengalami kekurangan guru PNS. Nah, per Agustus 2026 ini, kita mengalami kekurangan sekitar 400.000 guru PNS di sekolah negeri. Jadi, dengan membuka seleksi guru PNS, ini adalah solusi yang sangat cerdas untuk memenuhi kebutuhan guru di kelas.

Apa dampak nyata dari kebijakan ini?

Begini, jika terjadi kekurangan guru di sekolah-sekolah, tentu berdampak negatif terhadap hasil belajar, motivasi belajar murid, dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap mutu pendidikan. Pasalnya, ruang kelas tidak memiliki guru yang mengajar.

Apa ada saran mengenai mekanisme penerimaan gurunya?

Kami, P2G, mengusulkan kepada Pemerintah, khususnya Panselnas (Panitia Seleksi Nasional), agar 200.000 guru PPPK paruh waktu diangkat secara otomatis menjadi PPPK penuh waktu dengan kontrak sampai usia

penstren 60 tahun. Jadi, tidak hanya empat-lima tahun atau hanya satu tahun kontraknya, melainkan sampai pensiun dan tanpa tes. Ini adalah harga mati.

Kedua, bagi guru-guru PPPK penuh waktu yang menjadi PNS, kami memiliki dua alternatif solusi.

Apa saja solusinya?

Pertama, kurang lebih ada sekitar 800.000 guru PPPK penuh waktu. Mereka bisa diangkat langsung menjadi PNS tanpa tes.

Alternatif skema yang kedua, mereka tetap mengikuti tes. Karena memang Undang-Undang ASN membatasi maksimal calon PNS berusia 35 tahun. Sementara itu, guru-guru PPPK penuh waktu banyak yang berusia di atas 35 tahun, bahkan ada yang 50 tahun. Tentu ini terlarang oleh Undang-Undang ASN.

Oleh karena itu, bagi guru-guru PPPK penuh waktu yang sudah memiliki pengalaman mengajar di atas 10 tahun, diberikan afirmasi. Misalnya, skor pembobotan untuk menambah skor tes PNS. ■ **NINA**